

**Laporan KKL di Kantor
DPMDP2A**

**DAMPAK PENGALOKASIAN DANA BLT BAGI
MASYARAKAT DI KECAMATAN PAKKAT
DESA PAKKAT
HAUAGONG**



Disusun Oleh :

**Hotlas Toguh Pane
178510012**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2020**

**Laporan KKL di Kantor
DPMDP2A**

**DAMPAK PENGALOKASIAN DANA BLT BAGI
MASYARAKAT DI KECAMATAN PAKKAT
DESA PAKKAT HAUAGONG**



Disusun Oleh :

Hotlas Toguh Pane

178510012

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha esa karena atas limpahan rahmatnya, laporan pertanggungjawaban kegiatan KKN (Kuliah Kerja Lapangan) Universitas Medan Area pada akhirnya bisa saya selesaikan. Laporan pertanggungjawaban ini saya susun sebagai bukti pertanggungjawaban saya sebagai Bukti hasil KKN sayaa dalam setiap kegiatan yang saya jalani di Tempat saya KKL.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Kaprodi Ilmu Pemerintahan, Ibu dan bapak dosen pembimbing, serta segenap dosen dan jajaran karyawan Fakultas Universitas Medan Area yang telah banyak membantu kami dalam Kegiatan KKL ini dan saya juga mengucapkan Terima saya sampaikan kepada teman-teman Satu KKL dan juga teman - teman satu prodi yang telah membantu saya dalam memberikan informasi penting yang belum saya ketahui dan juga saya mengucapkan Terima kasih kepada Bapak dan ibu tempat saya KKL antara lain

1. Drs Elson Sihotang selaku Kepala Dinas pada Dinas Pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan, dan perlindungan anak
2. Frans Judika Pasaribu SE,M,SI selaku Sekretaris DI PMDP2A
3. Jerry Silitonga, SH,MM selaku Kepala Bidang Administrasi Pemerintah Desa di PMDP2A
4. Venny Sibarani,S.Sos selaku Kasi Administrasi Keuangan Desa di PMDP2A
5. Inrawaty K Purba,SE,M,SI selaku Kasi Kelembagaan dan Perangkat Desa di PMDP2A
6. Dimpos Situmorang,S.KOM selaku Kasi Evaluasi Pengendalian Administrasi Pemerintah Desa di PMDP2A
7. Robin Erikosn Pangaribuan,S.KOM selaku Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Pendapatan desa di PMDP2A
8. Mangandar Banjarnahor,S.pd selaku Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Peyelenggaran Desa di PMDP2A

9. Maju Pardamaean Manullang selaku Institusi Masyarakat Pedesaan

Laporan ini berisi tentang dampak pengalokasian dana BLT di masyarakat terkhusus masyarakat di kecamatan Pakkat. Dan juga laporan ini berisi tentang kegiatan yang saya alami dalam menjalani KKL di kantor Dinas PMDP2A.

Akhir kata, saya berharap semoga laporan ini membawa manfaat bagi Masyarakat, Pembaca dan terkhusus pada Mahasiswa dan juga saya sendiri, saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangan, maka dari itu saya mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan laporan saya selanjutnya. Terimakasih

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR NILAI KKL.....	
DAFTAR HADIR KKL	
SURAT KETERANGAN.....	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG KKL	5
1.2 TUJUAN PELAKSANAAN	5
1.2.1 TUJUAN UMUM.....	5
1.2.2 TUJUAN KHUSUS	5
1.3 MANFAAT PELAKSANAAN KKL.....	6
1.4 PROFIL PERUSAHAAN/LEMBAGA INSTANSI	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.LANDASAN TEORI.....	8
2.1.1. KEBUTUHAN DASAR	8
A.MUNCUNYA PEDEKATAN KEBUTUHAN DASAR	9
B. KONSEP PENDEKATAN KEBUTUHAN DASAR.....	9
C. CIRI – CIRI PENDEKATAN KEBUTUHAN DASAR.....	10
D. PERENCANAAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN.....	10
E. IMPLIKASI DARI STRATEGI KEBUTUHAN DASAR.....	11
2.2. BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT).....	11
A. ASAL USUL BLT.....	11
B. TEKNIS PENYALURAN BLT.....	13
BAB III METODOLOGI PELAKSANAAN.....	15
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan KKL.....	15
3.2 Metodologi pelaksanaan KKL.....	16
3.3. Metode Wawancara (Interview)	16
3.4. Metode Pengamatan (Observation)	16
3.5. Rangkuman Pekerjaan yang dilakukan selama KKL.....	16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	17
4.1. DAMPAK PENGALOKASIAN BLT KECAMATAN PAKKAT DESA PAKKAT HAUANGONG.....	17
5.2 PEMBAHASAN DAN HASIL	22
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	26
5.1 KESIMPULAN.....	26
5.2 SARAN	26

BAB I PENDAHULUAN

Mahasiswa memiliki peran yang besar dalam proses pembangunan bangsa ini. Sebagai Agen of Change, Mahasiswa berperan untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu untuk mencapai kemajuan. Perubahan-perubahan itu sendiri dapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dan atau lainnya sesuai dengan kebutuhan bangsa. Terkait dengan hal tersebut, Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan nyata yang dapat diterapkan dalam bidang bisnis maupun publik. Hanya dengan belajar dibangku kuliah, tidaklah cukup untuk membekali Mahasiswa agar memiliki kemampuan yang memadai. Perlu adanya kunjungan secara nyata sebagai pengalaman aplikatif.

Kuliah Kerja Lapangan adalah salah satu bentuk belajar praktik yang merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Pendidikan Universitas Medan Area. Kegiatan tersebut diikuti oleh mahasiswa/mahasiswi semester

6 dan beberapa dosen yang mendampingi. KKL dilakukan bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai dunia kerja sehingga mahasiswa dapat menyelaraskan dengan teori yang sudah didapat di tiap kunjungan yang dilakukan, selain itu para mahasiswa selanjutnya diberikan tugas untuk melaporkan hasil kunjungan tersebut dalam bentuk laporan.

Pada proses KKL berlangsung penulis melaksanakan kegiatan dalam penelitian proses Pengalokasian dan BLT di Kecamatan Pakkat Tempatnya Desa Pakkat Hauagong yang bertujuan untuk menyediakan layanan yang bertujuan untuk melihat apa dampak yang di dapatkan oleh masyarakat dengan ada program BLT ini, tempat pelaksanaan KKL yang penulis lakukan berada di kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di Instansi DPMDP2A, yang menurut penulis sesuai dengan Bidang Pendidikan yang di ambil penulis.

1.2. Tujuan KKL

1.2.1. Tujuan Umum :

1. Menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan dalam bentuk praktek kerja pada instansi/lembaga/industri juga menelaah apakah terjadi perbedaan
2. Mampu berbicara dan bersosialisasi dengan dunia industri/ instansi/ lembaga
3. Melatih mahasiswa untuk bekerja mandiri di lapangan dan menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan pekerjaan yang nanti akan ditekuni
4. Menambah wawasan mahasiswa tentang kerja dan manajemen instansi/ lembaga/ industr

1.2.2 Tujuan Khusus :

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana administrasi pemerintahan desa
2. untuk memberikan pengalaman bagaimana proses pengalokasian dana yang dibutuhkan oleh desa

1.3 Manfaat KKL

Ada pun manfaat KKL bagi mahasiswa/mahasiswa antara lain:

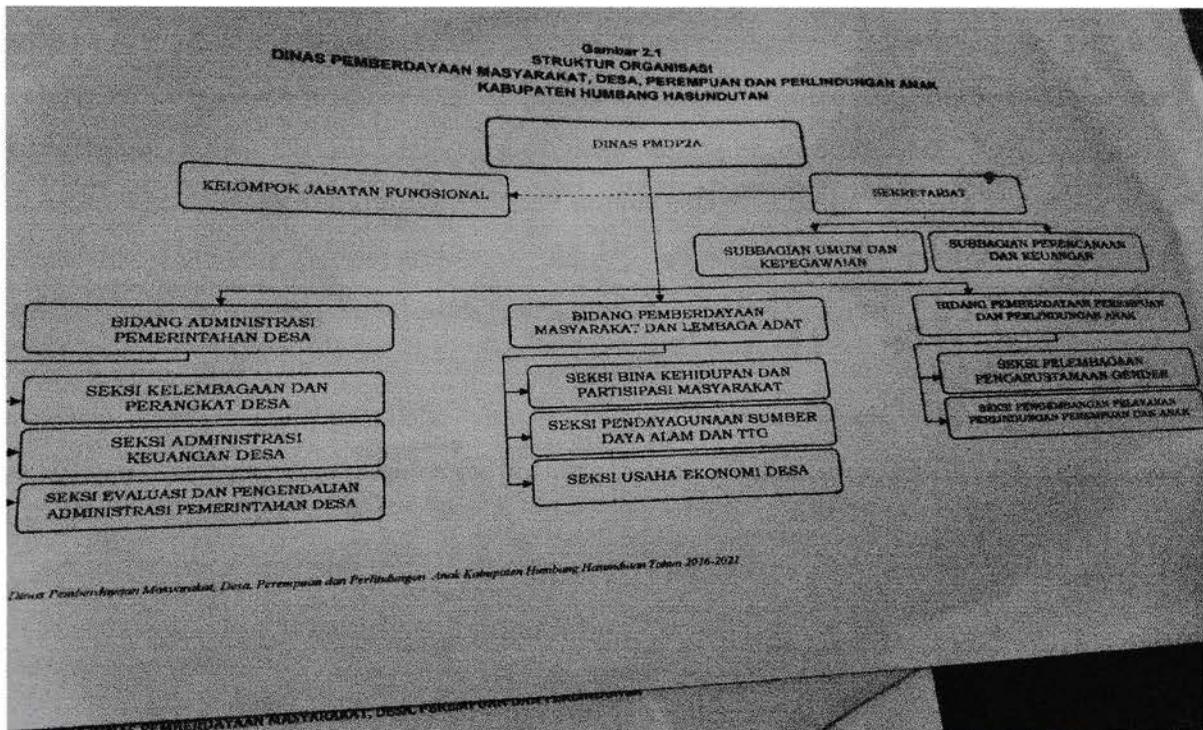
1. Dengan KKL ini mahasiswa dapat membandingkan antara teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dengan aplikasinya di dunia nyata.
2. Melalui KKL, mahasiswa dapat mengetahui seluk beluk profesi yang berkaitan dengan bidang studi yang sedang dipelajari.
3. Dengan pengalaman dan wawasan yang diperoleh ketika KKL, mahasiswa akan lebih siap ketika harus masuk ke dunia kerja dan bersosialisasi dengan masyarakat. Sehingga, para lulusan tidak akan merasa bingung lagi untuk bersikap dan dapat menghadapi segala kemungkinan masalah yang dapat terjadi.
4. Pelaksanaan KKL akan mendukung kegiatan akademik selanjutnya bagi mahasiswa. Karena pada umumnya kegiatan KKL lebih banyak berupa kegiatan observasi atau pengamatan, maka hasil dari pengamatan itu yang dapat menjadi sumber inspirasi

untuk skripsi yang memang menjadi syarat untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi.

1.4. Profil Perusahaan/Instansi/Lembaga atau lainnya.

Sejarah DPMDP2A (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan Dan perlindungan Anak)

Mulanya nama DPMDP2A adalah kantor pemberdayaan masyarakat desa dimana tempatnya pada tahun 2006 dimana kantor dinas DPMDP2A diuam hanya untuk menjalani prgram nasional PPK-PNPM, ditahun 2009 dinas PMDP2A menjadi kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan tgasya untuk menjalani prgram PNPM mandiri, dan ditahun 2017menjadi Kantor PMDP2A dimana Tufoksinya untuk menjalani program dana dsa dan program pemberdayaan perempuan dan anak



Struktur Organisasi DMPDP2A

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1. Kebutuhan Dasar (Basic Needs)

Dalam dasawarsa terakhir ini angka kemiskinan terus meningkat. Hal tersebut dibarengi dengan tingkat kesehatan yang memburuk dan konsumsi masyarakat golongan menengah kebawah akan kebutuhan dasar menurun. Untuk keluar dari masalah tersebut, pemerintah mulai memperhatikan kebutuhan dasar (basic need) bagi penduduknya, maka munculah program BLT yang harapannya mampu membantu pemenuhan konsumsi masyarakat golongan menengah kebawah, khususnya kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk dapat hidup sebagai layaknya manusia (Gilarso 1992 : 19). Hal ini mencakup kebutuhan primer atau kebutuhan fisik minimum yang secara kuantitatif seperti: makanan, pakaian dan perumahan, selain itu ada dua unsur tambahan yang penting yaitu yang berkaitan dengan kecukupan kebutuhan pokok minim bagi setiap warga masyarakat termasuk lapisan masyarakat paling miskin, yang meliputi kecukupan pangan, gizi, sandang, kesehatan, perumahan, pendidikan dan sarana pendukung lainnya seperti transportasi, air minum, rasa aman, dan sebagainya. Unsur keduanya adalah adanya kemampuan orang untuk memperoleh atau memenuhi kecukupan kebutuhan pokok tersebut terutama dengan memperoleh kesempatan kerja.

A. Munculnya Pendekatan Kebutuhan Dasar

Munculnya pendekatan kebutuhan dasar adalah pada tahun 1969 ketika International Labour Organization (ILO) meluncurkan program kesempatan kerja sedunia (World Employment Program, disingkat WEP). Perhatian WEP ditujukan pada masalah

kesempatan kerja di berbagai negara berkembang termasuk Kolombia, Kenya, Sudan, Srilangka, dan Filipina. Selama mempelajari masalah kesempatan kerja ini, WEP semakin banyak terlihat dalam masalah pembangunan yang lebih luas. Khususnya sebab-sebab pokok dari kegagalan strategi pembangunan konvensional yang dilaksanakan di negara tersebut, dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak secara berarti di negara ini. Fokus perhatian para ahli ILO mulai bergeser dari tekanan pada penciptaan lapangan kerja yang memadai ke penghapusan kemiskinan dan akhirnya ke penyediaan barang dan jasa bagi kebutuhan dasar penduduk. Pendekatan kebutuhan dasar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh penduduk di dalam setiap negara.

B. Konsep Pendekatan Kebutuhan Dasar

Tujuan utama dari pendekatan kebutuhan dasar dalam perencanaan pembangunan adalah untuk mencapai tujuan dengan dua perangkat sasaran yang terpisah, namun saling melengkapi. Perangkat sasaran yang pertama mencakup kebutuhan konsumsi perorangan seperti sandang, pangan dan papan. Perangkat sasaran kedua mencakup penyediaan jasa umum dasar seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan kebudayaan. Di samping kedua perangkat sasaran tersebut, konsep kebutuhan dasar juga digunakan untuk mencakup tiga sasaran lain yaitu :

1. hal atas pekerjaan produktif dan yang memberikan imbalan yang layak yaitu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap rumah tangga dan perorangan,
2. prasarana yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk,
3. partisipasi seluruh penduduk baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan proyek yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa kebutuhan dasar.

C. Ciri-ciri Pendekatan Kebutuhan Dasar

Suatu ciri pokok dari pendekatan kebutuhan dasar adalah tekanan pada pendekatan kebutuhan dasar seluruh penduduk. Dengan demikian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Strategi kebutuhan dasar mengutamakan investasi dalam sektor yang menghasilkan lebih banyak barang serta jasa kebutuhan dasar yang padat karya. Dengan strategi ini diharapkan dapat membantu mengurangi masalah pengangguran. Ciri pokok yang lain dalam pemenuhan kebutuhan dasar, akan diadakan suatu perbandingan antara pendekatan kebutuhan dasar dan pendekatan kemiskinan atau pendekatan anti kemiskinan yang konvensional dalam perencanaan pembangunan mengingat ada persamaan –persamaan yang nyata antara kedua pendekatan ini. Sejauh terdapatnya

suatu tingkat pemenuhan dasar absolute yang tertentu untuk seluruh penduduk berarti penghapusan kemiskinan, maka pendekatan kebutuhan dasar dalam perencanaan pembangunan adalah sama dengan pendekatan konvensional yang berorientasi anti kemiskinan. Akan tetapi ada perbedaan-pebedaan konseptual yang penting antara kedua pendekatan ini dalam perencanaan pembangunan adalah :

1. pendekatan yang berorientasi pada kemiskinan dalam perencanaan pembangunan memusatkan perhatian pada kelompok sasaran dalam masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan yang ditentukan, sedangkan pendekatan kebutuhan dasar beranggapan bahwa kemiskinan dibagian terbesar negara-negara berkembang tersebar luas dan oleh karenanya memerlukan program-program kebutuhan dasar untuk seluruh penduduk,
2. dalam usaha penghapusan kemiskinan, pendekatan yang berorientasi pada kemiskinan memusatkan perhatian usaha peningkatan terhadap barang dan jasa. Sedangkan sasaran kebutuhan dasar tidak terbatas pada penghapusan kemiskinan, melainkan meliputi pula pemenuhan kebutuhan di atas tingkat kelangsungan hidup sebagai

suatu cara untuk mengurangi dan bahkan menghapus kemiskinan relatif melalui suatu proses pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial yang mantap,

3. jika pendekatan yang berorientasi pada kemiskinan mendesak pemerintah untuk mengambil langkah kongkrit dalam menghapus kemiskinan, maka pendekatan tadi mengutamakan partisipasi massa secara kolektif baik dalam perumusan maupun dalam pelaksanaan program kebutuhan dasar agar tujuan pokok tidak diabaikan. Dengan demikian kebutuhan dasar sebenarnya menggabungkan dan mensintesisakan tujuan-tujuan dari strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan kesempatan kerja dan kemiskinan.

D. Perencanaan Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar

Dalam menyusun rencana pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dasar maka langkah-langkahnya adalah : a. Menentukan suatu tingkat tertentu dari kebutuhan dasar khususnya keperluan bagi konsumsi perorangan yang seharusnya dicapai oleh seluruh penduduk termasuk golongan penduduk yang berpendapatan rendah b. Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan dasar dicakup pula jasa-jasa pelayanan masyarakat yang merupakan bagian integral dari kebutuhan konsumsi perorangan seperti tersedianya fasilitas pendidikan, kesehatan serta air bersih c. Rencana kebutuhan dasar ditentukan dan diidentifikasi berbagai kelompok sasaran dalam masyarakat yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi masyarakat yang konsumsinya di bawah tingkat minimum d. Menentukan jadwal agar seluruh penduduk mampu mencapai tingkat minimum kebutuhan dasar. e. Memperkirakan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

E. Implikasi Dari Strategi Kebutuhan Dasar

Strategi pembangunan pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh

penduduk tidak berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak diperlukan lagi. Pemenuhan kebutuhan dasar hanya dapat terlaksana dalam konteks perekonomian yang bertumbuh pesat, namun keberhasilan strategi mutlak memerlukan perubahan dalam pola pertumbuhan ekonomi sedemikian rupa sehingga kapasitas produksi yang sudah ada dan yang sedang dibangun akan menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah lebih banyak sehingga memadai bagi kebutuhan seluruh penduduk. Implikasi dari perubahan dalam pola pertumbuhan ekonomi adalah bahwa perlu diadakan perubahan struktural dalam alokasi dan mobilisasi sumber daya produktif (modal, kewiraswataan, dan sumber daya alam) ke usaha kegiatan yang menghasilkan dan mendistribusikan secara merata barang dan jasa kebutuhan pokok. BLT termasuk dalam mobilisasi sumber daya produktif khususnya transfer modal sebesar Rp 300.000,- per tiga bulan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tertentu. Dari mobilitas modal tersebut diharapkan mampu membantu pemenuhan barang dan jasa kebutuhan pokok, sehingga terjadi distribusi yang merata untuk barang dan jasa kebutuhan pokok. Pendekatan kebutuhan dasar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh penduduk di dalam setiap negara. Kebutuhan yang dimaksud mencakup kebutuhan konsumsi perorangan seperti sandang, pangan dan papan. BLT merupakan salah satu program yang diberikan pemerintah 30 kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya konsumsi. Oleh sebab itu, maka dapat dikatakan bahwa BLT sebagai salah satu upaya perwujudan pemenuhan kebutuhan dasar yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas penduduk Indonesia, sehingga mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dan pada akhirnya mampu mendorong ke arah penghapusan kemiskinan dan mampu mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi.

2.2. BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (bahasa Inggris: cash transfers) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (conditional cash transfer) maupun tak bersyarat (unconditional cash transfer) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.

Seorang ibu mengambil dana Bantuan Langsung Tunai (cash transfers) di Kantor Pos. BLT adalah sebuah program bantuan uang cuma-cuma di Indonesia yang digalakan pemerintah dalam rangka menyambut kenaikan bahan bakar minyak.

Indonesia juga merupakan negara penyelenggara BLT, dengan mekanisme berupa pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan target pada tiga tingkatan: hampir miskin, miskin, sangat miskin. BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan

sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.

A. Asal usul BLT di Indonesia

Pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia memastikan harga minyak dunia

naik, mereka pun memutuskan memotong subsidi minyak. Hal ini dilakukan dengan alasan BBM bersubsidi lebih banyak digunakan oleh orang-orang dari kalangan industri dan berstatus mampu. Lalu, setelah didata lebih lanjut, diketahui dari tahun 1998 sampai dengan 2005 penggunaan bahan bakar bersubsidi telah digunakan sebanyak 75 persen. Pemotongan subsidi terus terjadi hingga tahun 2008 dengan kenaikan sebesar 50 persen dari harga awal, karena harga minyak dunia kembali naik saat itu.^[8] Akibatnya, harga bahan-bahan pokok pun ikut naik.

No	Uraian	BLT 2005	BLT 2008
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dasar Peraturan	Inpres no: 12 tahun 2005	Inpres no: 3 tahun 2008
2	Penerima Manfaat	Rumah Tangga Miskin (RTM)	Rumah Tangga Sasaran (RTS)
3	Jumlah Bulan	12 bulan	7 bulan
4	Periode Pembayaran	4 kali	2 kali
5	Nominal Pembayaran	Rp 300.000,-/periode	Rp 300.000,- dan Rp 400.000,-
6	Verifikasi Data	BPS	PT. Pos Indonesia

Sumber : BPS tahun 2006 dan Departemen Sosial 2008

Tabel mengenai poin-poin perbedaan program BLT di Indonesia sekitar tahun 2006 dan 2008. Demi menanggulangi efek kenaikan harga bagi kelompok masyarakat miskin, pemerintah memperkenalkan program BLT kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005. Program ini dicetuskan oleh Jusuf Kalla tepat setelah dirinya dan Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia pada tahun 2004. Akhirnya, berdasarkan instruksi presiden nomor 12, digalakanlah program Bantuan Langsung Tunai tidak bersyarat pada Oktober tahun 2005 hingga Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin. Lalu, karena harga minyak dunia kembali naik, BLT pun kembali diselenggarakan pada tahun 2008 berdasarkan instruksi presiden Indonesia nomor 3 tahun 2008. Dan terakhir, pada tahun 2013, pemerintah kembali menyelenggarakan BLT tetapi dengan nama baru: Bantuan

Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Secara mekanisme, BLSM sama seperti BLT, dan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk program ini adalah 3,8 triliun rupiah untuk 18,5 juta keluarga miskin, dengan uang tunai 100 ribu rupiah per bulannya.

Selain program BLT tak bersyarat, pemerintah juga menyelenggarakan program BLT bersyarat dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program bantuan untuk keluarga miskin dengan syarat mereka harus menyekolahkan anaknya dan melakukan cek kesehatan rutin. Target utama dari program ini adalah keluarga miskin dengan anak berusia antara 0 sampai 15 tahun, atau ibu yang sedang hamil pada saat mendaftar. Dana tunai akan diberikan kepada keluarga pendaftar selama enam tahun. Program ini menargetkan sekitar 2,4 juta keluarga miskin, dan telah diberikan ke 20 provinsi, 86 daerah, dan 739 sub daerah dengan jumlah telah menyentuh 816.000 keluarga miskin.

B. Teknis penyaluran BLT di Indonesia

Tahapan pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Indonesia umumnya dimulai dari sosialisasi, verifikasi data nama nominasi Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang akan diberikan bantuan, pembagian kartu BLT, pencairan dana, dan terakhir pembuatan laporan dan evaluasi. Mekanisme pembagian BLT yang terstruktur baru diberlakukan pada tahun 2008, dan mekanisme ini tetap digunakan pada tahun 2013. Tetapi pada tahun 2013 penyelenggaraan BLT tidak lagi menggunakan kartu, melainkan langsung dengan kartu penerima beras miskin (raskin). Rincian kerja dan mekanisme BLT adalah:

1. Sosialisasi dilaksanakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika dan Departemen Sosial bersama dengan elemen

masyarakat lainnya seperti kepala pemerintah di daerah-daerah, lembaga sosial kemasyarakatan, dan tokoh-tokoh masyarakat.

2. Setelah nama dan alamat para nominasi penerima BLT terdaftar, selanjutnya data dikirimkan ke PT Pos Indonesia untuk diproses.
3. Selesai diproses, kartu penerima BLT dicetak dengan tanda tangan dari Menteri Keuangan. Selanjutnya kartu-kartu tersebut dikirim kembali ke kantor kelurahan masing-masing untuk dicek, setelah itu baru dibagikan.
4. Kartu yang telah dimiliki dapat digunakan untuk meminta pencairan dana BLT di Kantor Pos atau di tempat-tempat tertentu sesuai jadwal masing-masing. Jika kartu BLT hilang atau data tidak sesuai, warga tetap bisa meminta dengan bukti berupa identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau Surat Keterangan dari Kelurahan. Tetapi kartu asli tanda terima BLT tetap tidak bisa diganti.
5. Terakhir, BLT yang telah berjalan tiap bulannya akan dievaluasi dan diperiksa oleh tim khusus dan hasil laporannya dikirim ke Departemen Sosial.



Alur sederhana pembagian BLT pada tahun 2008 dan 2013. Tahapan pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Indonesia umumnya dimulai dari sosialisasi, verifikasi data daftar nama nominasi penerima BLT, pembagian kupon BLT, pencairan dana, dan terakhir pembuatan laporan evaluatif.

BAB III.

METODOLOGI PELAKSANAAN KKL.

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan KKL

Ada beberapa hal penting yang perlu disebutkan terkait dengan lokasi KKL. Pertama adalah menyebutkan tempat kuliah kerja lapangan (KKL) misalnya: desa, komunitas atau lembaga tertentu. Kedua, mengemukakan alasan adanya kendala politik atau peristiwa seperti yang dimaksud oleh kata kunci KKL terjadi di lokasi tersebut. Pelaksanaan KKL ini berada di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan Dan Anak di Jl. Letkol. P.H. Purba di Doloksanggul. Lokasi KKL merupakan tempat melakukan kegiatan dimulai pada tanggal 13 Juli 2020 s.d 12 Agustus 2020

3.2 Metodologi pelaksanaan KKL

Metode Pengumpulan Data Penelitian ini memperoleh data sebagai bahan laporan praktek kerjalapangan dengan menggunakan beberapa metode serta pembahasan masalah selama melakukan praktek kerjalapangan pada kantor DPMDP2A Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :

3.3 Metode Wawancara (Interview)

Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab / interview secara langsung dengan Pengurus atau pegawai DPMDP2A Humbang Hasundutan dan dengan data yang diperlukan agar lebih jelas.

3.4. Metode Pengamatan (Observation)

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di tempat KKL yang bersangkutan, tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang benar dan akurat, sehingga dapat mengetahui bagaimana proses berjalannya BLT dan Desa

3.5. Rangkuman Pekerjaan yang dilakukan selama KKL

Dalam melaksanakan kuliah kerja lapangan yang dilakukan di kantor DPMDP2A Humbahas, adapun kegiatan operasional pekerjaan diantaranya adalah melakukan wawancara kepada Kepala Dinas dan ikut membantu di bagian Administrasi pemerintahan seperti halnya mendata BLT setiap kecamatan, mendata PERDES DAN PERKADES dan mendata SPJ setiap desa, membuat data sekdes dan perangkat, membuat data kemendagri, menyusun APBDes tiap kecamatan, serta ikut membantu staff dalam mengoreksi baik SPJ (surat pertanggung jawaban dan lainnya) dan juga merekap data – data tiap desa tentang dana BLT yang telah diterima masyarakat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. DAMPAK PENGALOKASIAN BLT KECAMATAN PAKKAT DESA PAKKAT HAUANGONG

Program BLT pertama kali di cetuskan oleh negara brazil , lalu indonesia menganutnya pada tahun 2005 akibat dari kenaikan harga BBM pada tahun 2004, Pemerintah indonesia langsung tanggap dimana jumlah perasetasi masyarakat yang tidak mampu(miskin) sangat banyak di indonesia sehingga presiden Jusuf Kalla dan Susilo Bambang yudhoyono mengeluarkan intruksi presiden. Akhirnya, berdasarkan instruksi presiden nomor 12, digalakanlah program Bantuan Langsung Tunai tidak bersyarat pada Oktober tahun 2005 hingga Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin. Lalu, karena harga minyak dunia kembali naik, BLT pun kembali diselenggarakan pada tahun 2008 berdasarkan instruksi presiden Indonesia nomor 3 tahun 2008 Dan terakhir, pada tahun 2013, pemerintah kembali menyelenggarakan BLT tetapi dengan nama baru: Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Secara mekanisme, BLSM sama seperti BLT, dan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk program ini adalah 3,8 triliun rupiah untuk 18,5 juta keluarga miskin, dengan uang tunai 100 ribu rupiah per bulannya.

Nah ditahun 2020 ini program BLT masih berlanjut namun bukan karna kenaikan harga BBM tetapi di akibatkan pandemi yang melanda yaitu COVID 19 yang mengakibatkan banyaknya masyarakat kehilangan pekerjaannya di karenakan menghindari tersebarnya atau terinfeksi nya masyarakat terhadap COVID 19, bukan hanya berdampak bagi masyarakat namun juga berdampak pada sistem pemerintahan baik di bidang Politik, sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, dan juga baik di sektor perusahaan.

Maka dari itu pemerintah mengeluarkan PERMENDES Nomor 6 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

Menimbang:

- A. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa
- B. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan SALINAN Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- D. Permasalahan yang dihadapi dalam program BLT ini sangat beragam dimana masih ada simpang siur bagi masyarakat yang berhak menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) dimana masyarakat yang berhak mendapatkan BLT adalah sebagai berikut :
 1. Masyarakat yang kehilangan pekerjaannya
 2. Masyarakat yang tidak mampu
 3. Pengusaha, dan seterusnya

Nah disinilah titik permasalahan itu, dimana dalam kategori penerima BLT Pengusaha masuk dalam kategorinya, yang dimana seharusnya menurut saya sendiri Pengusaha tidak seharusnya mendapatkan bantuan langsung dari

pemerintah, walaupun mungkin pengusaha tersebut memiliki pemasukan yang menurun akibat dampak pandemi yang tengah melanda, namun setidaknya para pengusaha masih memiliki penghasilan yang cukup. Hal ini menjadi pro dan kontra dimasyarakat terkhusus di Kecamatan Pakkat Desa Pakkat Hauagong, dimana saya melihat pengusaha yang terbilang memiliki aset dan mata pencaharian termasuk dalam salah satu masyarakat yang menerima berharap pemerintah lebih cepat dan tanggap dalam menanggapi permasalahan ini. Hanya dengan kesadaran par

Penyelesaian yang dilakukan yaitu hanya dengan kesadaran bagi para masyarakat yang merasa tidak seharusnya menerima bantuan langsung tunai yaitu dengan mengembalikan dana BLT yang telah diterima, dan juga penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengecek satu persatu masyarakat yang menerima BLT, seperti dengan mengecek rumah pekerjaannya. Hal ini bisa dikatakan efektif karena pemerintah desa langsung melakukan observasi langsung ke tempat kediaman

masyarakat yang menerima blt. A. Praktek Kerja Langsung PMDP2A

Praktek kerja langsung yang penulis lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Anak yaitu,

1. Merekapitulasi data Dana BLT per tiap kecamatan dan Tiap desa
2. Melakukan evaluasi kelengkapan tentang data data perangkat desa
3. Merakpitulasi RPJMDes per tiap desa
4. Dinas PMDP2A melakukan sosialisai ke masyarakat.



Proses Pengerjaan Rekapitulasi data Dana BLT

B. Diskusi dan Wawancara bersama DPMDP2A

Dalam Menjalankan program yang dilakukan oleh dinas PMDP2A kami selaku Mahasiswa KKL sering melakukan kegiatan Diskusi terhadap para pegawai tentang bagaimanaposes dalam menghadapi para preangkat desa yang data pertiap Kecamatan Dan juga kami sering berdiskusi tentang PerPPU tentang Perdes, dan Juga kami melakukan diskusi dengan para perangkat desa yang datang ke DPMDP2A, menanyakan soala apa kesulitan dalam mengurus Desa-desa bahkan kami juga melakuan diskusi ringan seperti berdiskusi di selinggi dengan candaan.

5.2. PEMBAHASAN DAN HASIL

Pandemi corona membawa berbagai dampak. Tidak hanya dampak kesehatan, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi dimasyarakat terkhusus masyarakat Kecamatan Pakkat Desa Pakkat Hauagong, lalu datanglah berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah salah satunya BLT(Bantuan Langsung Tunai) dana desa.

BLT dana desa adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa bagi masyarakat miskin dari dana desa, bantuan yang diterima sebesar Rp.600.000 Rupiah perbulannya. Namun dikarenakan terjadi pandemi yang melanda seluruh dunia termasuk salah satunya di Kecamatan Pakkat Desa Pakkat Hauagong.

Nah dari pandemi ini, dengan adanya BLT dana desa yang dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu, bukan cuman itu saja tapi bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi Covid 19 ini. Saya melihat dampak dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah ini sangat berdampak positif bagi masyarakat terkhusus masyarakat Kecamatan Pakkat Desa Pakkat Hauagong, dimana dengan adanya BLT dan dana ini, Masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dan masyarakat miskin dapat melanjutkan hidup mereka dengan dana yang diberikan pemerintah.

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat ini sangat bermanfaat dan juga sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi di masyarakat, namun yang sangat disayangkan adalah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana Covid 19 ini menjadi dan yang dibuat untuk memperkaya diri sendiri, hal ini sering dijumpai di pemerintah desa, namun masyarakat kurang tanggap dan kurang memberikan perhatiannya sehingga hal seperti ini sering terjadi. Terlebih lagi dalam proses pengalokasian dana BLT sering ditemui kegagalan seperti sifat Nepotisme yang dilakukan oleh pelaksana dalam pembagian dana BLT dana desa. contoh kasus:

Berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017, maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU tahun 2013 mengungkapkan beberapa penyalahgunaan yang terjadi dalam pelaksanaan BLT pada tahun 2005 dan 2008, seperti tidak tepat sasaran, menciptakan peluang korupsi, dan menimbulkan konflik sosial. Meskipun terdapat persamaan dan perbedaan dalam program diantara kedua program BLT tersebut. Ada beberapa

potensi yang dapat menyebabkan maladministrasi dalam pelaksanaan BLT-Dana Desa dalam sudut pandang Ombudsman Republik Indonesia.

Pertama, penyimpangan prosedur. Beberapa hal menyebabkannya, yaitu kriteria penerima tidak tepat, pendataan tidak menyeluruh dan nepotisme, dan integritas pendata sekaligus masyarakat yang didata meragukan. Pada program BLT-Dana Desa yang dapat menyebabkan maladministrasi, seperti penerima BLT- Dana Desa juga menerima bantuan sosial dari pemerintah lainnya (seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Kartu Pra Kerja), Penerima tidak terdampak kehilangan mata pencaharian karena wabah Covid-19, dan Penerima merupakan keluarga dalam kondisi sehat dan mampu. Perilaku nepotisme masih tetap menjadi musuh apabila perangkat desa atau RT/RW mencantumkan keluarga mereka sebagai Penerima walaupun tidak sesuai kriteria. Selain itu, bagi masyarakat terdata menerima BLT-Dana Desa merasa kategori keluarga mampu agar mengalihkan kepada Penerima yang berhak. Kesadaran masyarakat sangat penting sekali untuk mengatasi masalah tidak tepat sasaran selain dari kesadaran penyelenggara.

Kedua, permintaan imbalan. Pelaksanaan BLT sebelumnya memunculkan perilaku "sunat" BLT sehingga Penerima tidak menerima uang bantuan dalam jumlah utuh. Justru perilaku "sunat" BLT ini dilakukan oleh oknum-oknum aparat desa. Meskipun BLT-Dana Desa dilakukan dengan cash transfer tidak menutup kemungkinan ada celah yang dilakukan oleh oknum perangkat desa menyunat dana bantuan tersebut. Beberapa kemungkinan dapat dilakukan seperti adanya kesepakatan pemotongan uang BLT Dana

-Desa dari Penerima dengan oknum aparat desa melalui rembuk desa. Hal ini pernah terjadi pada pelaksanaan BLT Tahun 2008 adalah permintaan sumbangan sukarela oleh oknum aparat desa kepada Penerima sebagai ucapan terima kasih.

Ketiga, penyalahgunaan wewenang. Menurut Menteri Desa dan PDTT, Penerima BLT- Dana Desa diberikan dalam bentuk uang, bukan sembako. Hal ini menjadi catatan penting, apabila ditemukan Penerima BLT-Dana Desa menerima dalam bentuk sembako maka hal itu dikategorikan maladministrasi apapun alasannya.

Keempat, konflik kepentingan. Pada umumnya konflik dapat terjadi melibatkan berbagai pihak mulai dari keluarga sampai pemerintah desa. Akan tetapi, ada satu bentuk konflik yang sering dijumpai adalah cemburu sosial. Hal ini timbul karena komentar sinis dari bukan Penerima kepada Penerima dan tuduhan nepotisme dan keadilan yang dilakukan oleh aparat desa dalam penetapan Penerima BLT. Ini menunjukkan masyarakat tidak memiliki akses pegaduan keluhan mereka sehingga mereka melampiaskan kepada pihak-pihak yang bersentuhan dengan program

tersebut.

Terakhir, tidak memberikan layanan. Berkaca pada pelaksanaan BLT Tahun 2008 yang tidak ada unit penanganan pengaduan BLT menyebabkan laporan masyarakat tidak ditanggapi, respon jawaban tidak jelas dan membingungkan ("tidak tahu", "silakan tanya ke pihak lain", dan "ketentuan pusat"), dan menyelesaikan aduan masyarakat tidak berdasarkan ketentuan. Pada program BLT-Dana Desa, pada tingkat pertama yang perlu didorong menangani aduan masyarakat adalah Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana tugas mereka sebagai penghubung aspirasi masyarakat kepada Pemerintahan Desa.

Dari penjelasan di atas, diperlukan partisipasi masyarakat dan pihak lainnya untuk mengawasi pelaksanaan program BLT-Dana Desa agar tidak terjadi maladministrasi. Pemerintah Pusat melalui Kemendes PDTT menekankan agar Penerima BLT-Dana Desa tepat sasaran dan tidak ada yang mempermainkan dana tersebut. Oleh sebab itu, peran serta masyarakat dapat mengadukan oknum-oknum aparat yang melakukan maladministrasi tersebut kepada instansi yang terkait, mulai dari tingkat pemerintah desa, pemerintah daerah dan pusat, dan upaya terakhir Ombudsman RI. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan good governance dan clean governance dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik

Dari contoh kasus di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pemerintah sudah sepenuhnya menjalankan kebijakan yang dibuat hanya saja individu yang tidak dapat menahan napsunya akan tergoda seperti contoh kasus yang telah saya ambil.

Dengan adanya peraturan pemerintah tentang masalah BLT ini saya merasa tetap dilanjutkan karena dengan adanya bantuan yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu dan terkena dampak Covid 19, menjadi salah satu solusi untuk menanggulangi terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat, dan otomatis masyarakat akan mengambil sebuah tindakan untuk mempergunakan dana yang diberikan pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan ini penulis mendapatkan banyak pengetahuan secara nyata dalam menerapkan ilmu yang diperoleh pada saat perkuliahan, sehingga dapat di praktekkan secara maksimal ketika melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan. Selain itu Kuliah Kerja Lapangan adalah sarana bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja nyata sekaligus mengenal lingkungan dan kondisi kerja yang nantinya akan dihadapi mahasiswa setelah lulus kuliah. Dengan ini penulis yang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata di Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Anak (PMDP2A) Kuliah Kerja Lapangan yang telah diprogramkan oleh perguruan tinggi ini memang bertujuan dalam memberikan pengalaman dan wawasan kepada mahasiswa mengenai kehidupan di masyarakat maupun dunia kerja.

Pengalaman belajar yang diperoleh dari kegiatan Kuliah Kerja Lapangan yang didapatkan mahasiswa harapannya dapat memberikan bekal hidup dalam bersosialisasi selepas dari perguruan tinggi nanti. Dari pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan yang dilakukan di kantor DPMDP2A di Humbang Hasundutan bahwa yang penting dimana kita mengetahui bagaimana cara menghadapi beberapa masalah dan kita belajar nyata dalam melayani masyarakat dan dimana kita diajarkan teliti dalam melakukan sebuah pekerjaan ,

5.2 SARAN

Pada umumnya pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan merupakan penghubung antara dunia pendidikan dengan dunia kerja, mahasiswa dapat melihat dan mengetahui kesesuaian antara teori yang didapatkan di bangku kuliah dengan praktek di lapangan. Sebelum penulis menutup laporan ini, ijin penulis memberikan sedikit saran. Adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut : Terlepas dari sudah berjalannya sistem yang ada di kantor DPMDP2A Humbang Hasundutan , masih terdapat beberapa hal yang mungkin perlu ditambahkan untuk lebih baik kedepan antara lain sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada kepala desa dan masyarakat lebih terbuka supaya tidak adanya pikiran negatif dan bekerja sama dalam menjalankan Program BLT dana Desa
2. Diharapkan kepada DPMDP2A supaya tetap harmonis dan kerja sama dalam melakukan sesuatu baik dalam kantor maupun di lapangan .
3. Pemerintah Desa lebih baik lagi dalam memberikan atau menyampaikan informasi pertanggungjawaban kepada pemerintah agar tidak ada lagi

keterlambatan dalam penyampaian informasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga pencairan tidak ada yang terlambat

KOMUNITAS MASYARAKAT ALUMNI ILMU CANGRAJA

PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	AMAR	KELOMPOK	KELOMPOK
1	1	KELOMPOK 1	KELOMPOK 1
			KELOMPOK 2
			KELOMPOK 3
			KELOMPOK 4
2	2	KELOMPOK 1	KELOMPOK 1
			KELOMPOK 2
			KELOMPOK 3
			KELOMPOK 4
3	3	KELOMPOK 1	KELOMPOK 1
			KELOMPOK 2
			KELOMPOK 3
			KELOMPOK 4
4	4	KELOMPOK 1	KELOMPOK 1
			KELOMPOK 2
			KELOMPOK 3
			KELOMPOK 4
5	5	KELOMPOK 1	KELOMPOK 1
			KELOMPOK 2
			KELOMPOK 3
			KELOMPOK 4

PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Lektok P. 2A Purba Dolok Sanggalah Telp. 06151911003
http://www.kab.humbanghasundutan.go.id Email: humbang@humbanghasundutan.go.id

Telah dilaksanakan: **Kuliah Kerja Lapangan (KKL)** Mahasiswa program studi **Kel.1**
PEMERINTAH Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area dengan data sebagai berikut:

Nama : **Martas Toguh Pine**
 NPM : **178510012**
 Periode : **13 Juli 2020 s.d 12 Agustus 2020**
 Lokasi KKL : **Humbang Hasundutan**

Maka dari kegiatan tersebut telah dilakukan penitikan dengan materi berikut:

No	Jumlah Kegiatan	Nilai
1	Disiplin	90
2	Kerjasama	85
3	Inisiatif	80
4	Sikap Kerja	90
5	Etika Berkomunikasi	90
	Jumlah	435
	Nilai Rata-rata	87

Mendian penitikan ini dibuat, termasuk atas perhatian dan kerja samanya.

Yang Mengetahui :
DOSEN PEMBIMBING

KEMARA BUDHIS
 Administrasi Pemerintahan Desa

Dra. Wardah, M.Hum

RESENY SILVIANIA, S.HUM
 NPM: 1712010120000000



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Letkol P. H. Purba Doloksanggul Telp. (0643) 31003
http://dppmdpa.humbanghasundutankab.go.id Email: dppmdpa@humbanghasundutankab.go.id
DOLOKSANGGUL

SURAT KETERANGAN

Nomor : 923.47 /PMDP/2A/Vis/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Drs. ELSON SIHOTANG
NIP : 19630429 198303 1 004
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini Rabu tanggal dua belas bulan agustus Tahun dua ribu dua puluh telah selesai melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) terhitung sejak tanggal 13 Juli s/d 12 Agustus 2020 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan.

Sekaitan dengan itu kami Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan menyerahkan kembali mahasiswa yang terdiri dari 3 (tiga) Orang masing-masing adalah :

1. Hotias Toguh Pane NPM. 178510012
2. Afti Anju Tribintang Sinurat NPM. 178510015
3. Aman Sandro Sarumpaet NPM. 178510011

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Doloksanggul, Agustus 2020

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.**

Drs. ELSON SIHOTANG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630429 198303 1 004

PARAF PEMANGGUNG JAWAB	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBID / KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
STAF	

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN